

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini telah berdampak pada arah persaingan bisnis yang sangat ketat, menuntut perusahaan/organisasi untuk menggunakan kompetensi yang ada dengan semaksimal mungkin, agar dapat memenangkan persaingan, dimulai dari kemampuan memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Sehingga tuntutan untuk memodernisasi praktek manajemen keuangan baik di organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi secara optimal selalu menjadi prioritas utama sebuah organisasi.

Kinerja manajerial sangat didukung oleh sistem informasi, atau biasa disebut dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan dan menyediakan alternatif dari berbagai kegiatan perusahaan. Karakteristik sistem akuntansi manajemen yang bermanfaat berdasarkan persepsi manajerial sebagai pengambil keputusan antara lain: *broad scope*, *timeliness*, *aggregation* dan *integration* (Chenhall dan Morris dalam Dzillan 2010). Salah satu fungsi karakteristik sistem akuntansi manajemen adalah sebagai sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya, serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan sukses (Ietje Nazaruddin Dzalim 2010). Hasil penelitian

Yuristisia (2009) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Desentralisasi dapat diartikan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat terhadap pejabat di bawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat (Miah dan Mia dalam Karyanti 2010). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bisa menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik. Pengelolaan kewenangan secara desentralisasi diharapkan bahwa keputusan dapat diambil dengan cepat sehingga tidak mengganggu terhadap operasional perusahaan. Selain itu dengan adanya desentralisasi maka keputusan dapat diambil oleh satu pihak sehingga tidak terjadi keracunan dalam pengambilan keputusan. Gordon dan Narayanan dalam Andika Rante (2014) mengemukakan bahwa ide dasar desentralisasi menunjukkan pada tingkat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak kepada manajer menengah dan bawah dalam bentuk pembuatan keputusan. Desmiyawati (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui penggunaan sistem akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini peneliti juga menambahkan variabel lain yaitu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan hal yang berhubungan dengan factor eksternal individu. Ketidakpastian lingkungan dapat digambarkan sebagai rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu secara akurat. Ketidakpastian lingkungan berhubungan faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Ketidakpastian lingkungan berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari keputusan yang diambil. Hal ini menyebabkan besarnya kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam mengambil keputusan tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Ketidakpastian lingkungan akan berbanding terbalik dengan kemampuan memprediksi keadaan yang akan terjadi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Setiawan (2012) bahwa dalam lingkungan ketidakpastian rendah, individu dapat memprediksi keadaan secara lebih akurat. Utami (2012) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat dicapai dengan salah satu cara, yaitu meningkatkan kinerja manajerial. Secara umum, kinerja diartikan sebagai suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Bastian dalam Dzilan (2010). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan,

investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahone dalam Dzillan 2010).

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dengan kinerja uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja manajerial adalah kinerja manajer dalam kegiatan- kegiatan yang meliputi perencanaan, investigasi, pengoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf (staffing), dan perwakilan/representatif di lingkungan organisasinya (Siswanto Sastrohadiwiryono dalam Setiawati 2009).

Selain itu kinerja manajerial organisasi pemerintahan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan struktur desentralisasi (Mulyadi dalam Setiawati 2009). Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja manajerial yang selama ini dilakukan adalah dalam lingkup perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara sedangkan penelitian mengenai kinerja manajerial pemerintahan daerah masih terbilang jarang (Suryani 2013). Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada *research* mengenai kinerja manajerial pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan karena, pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada

penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Dengan adanya peraturan-peraturan otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang kinerjanya dinilai kurang dalam hal pelayanan dan pemuasan kebutuhan masyarakat salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Dalam usaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dirasa belum maksimal ini terlihat dengan masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat sebagai bukti ketidakpuasan akan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe maraknya aksi demonstrasi yang menuntut pelayanan yang kurang maksimal dan disinyalir disebabkan oleh lemahnya kinerja manajerial serta tidak adanya koordinasi dan desentralisasi yang baik antar struktur di Pemerintahan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil judul **“Dampak Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pokok permasalahan yaitu apakah ketiga variabel yang dipilih yaitu Informasi Akuntansi Manajemen Desentralisasi dan ketidak pastian lingkungan dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe. Maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara?
- 2) Bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara?
- 3) Sejauh mana ketidakpastian lingkungan berpengaruh dalam peningkatan kinerja manajerial Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara?
- 4) Informasi akuntansi manajemen, desentralisasi, ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis apakah penggunaan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
- 3) Untuk menganalisis sejauh mana ketidakpastian lingkungan berpengaruh dalam peningkatan kinerja manajerial Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
- 4) Informasi Akuntansi Manajemen, desentralisasi, ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan dapat menjadi instrument pendukung dalam membantu pembuatan keputusan peningkatan kinerja manajerial.
- 2) Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi organisasi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja manajerial dengan penggunaan sistem informasi desentralisasi dan analisis ketidakpastian lingkungan.